

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Sampul Dalam</b> .....	<b>i</b>
<b>Prasyarat Gelar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Lembar Persetujuan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Pernyataan Tidak Plagiat</b> .....	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Ringkasan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Summary</b> .....	<b>xii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>xv</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xvi</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xix</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	19
I.3. Tujuan Penelitian.....	19
I.4. Manfaat Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS</b>	
II.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	21
II.2. Kerangka Teori.....	32
II.2.1. Kebijakan Publik.....	32
II.2.2. Proses Kebijakan Publik.....	36
II.2.3. Komponen Kebijakan Publik.....	38
II.2.3.1 Pelaku/Aktor Kebijakan.....	39
II.2.3.2 Lingkungan Kebijakan.....	39
II.2.3.3 Isi Kebijakan.....	40
II.2.4. Hubungan Antar Stakeholder.....	40
II.2.5. Instrumen Kebijakan.....	44
II.2.5.1 Jenis Instrumen.....	47
II.2.5.2 Keefektifan Instrumen Kebijakan.....	53
II.2.5.3 Pengembangan Instrumen Kebijakan.....	55
II.2.6. Pengertian Perkawinan.....	56
II.2.6.1 Syarat Sah Perkawinan.....	62
II.2.6.2 Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia.....	64
II.2.6.3 Fungsi-fungsi perkawinan.....	65

II.2.7. Definisi Konsep.....	67
II.2.8. Kerangka Berfikir .....	69
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
III.1. Metode dan Jenis Penelitian.....	71
III.2. Lokasi Penelitian.....	73
III.3. Fokus Penelitian.....	74
III.4. Teknik penentuan Informan .....	77
III.5. Teknik Analisis Data.....	79
III.6. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	82
III.7. Teknik Tehnik Pengumpulan Data.....	83
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>	
IV.1. Gambaran Umum Kabupaten Sampang.....	84
IV.1.1. Letak Geografis.....	84
IV.2.Sosial Ekonomi .....	85
IV.2.1.Sektor Mata Pencarian .....	85
IV.2.2.Sektor Pendidikan .....	86
IV.2.3.Sektor Kesehatan .....	87
IV.3.Budaya Patriarki Kabupaten Sampang.....	87
<b>BAB V PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
V.1.Instrumen Kebijakan yang digunakan dalam Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Sampang .....	95
V.1.1. Identifikasi Instrumen Kebijakan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur yang digunakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang .....	95
V.1.2. Identifikasi Instrumen Kebijakan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur yang di gunakan pada Dinas Sosial Kabupaten Sampang.....	103
V.1.3. Identifikasi Instrumen Kebijakan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur yang di gunakan pada Kementerian Agama Kabupaten Sampang .....	107
V.1.4. Identifikasi Instrumen Kebijakan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur yang di gunakan pada	

Kantor Urusan Agama Kabupaten Sampang.....	113
V.1.5. Identifikasi Instrumen Kebijakan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur yang di gunakan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.....	119
V.1.6. Identifikasi Instrumen Kebijakan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur yang di gunakan pada Pengadilan Agama Kabupaten Sampang.....	124
V.1.7. Instrumen Kebijakan Penerapan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk mengurangi praktek perkawinan di bawah umur di Kabupaten Sampang .....	129
V.2. Bagaimana Instrumen Kebijakan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Sampang.....	132
V.2.1. Instrumen Kebijakan <i>Family and Community</i> .....	133
V.2.2. Instrumen Kebijakan <i>Regulation</i> .....	134
V.2.3. Instrumen Kebijakan <i>Information and Exhortation</i> .....	135
<b>BAB VI INTERPRETASI TEORITIK</b>	
V1.1. Instrumen Kebijakan yang Digunakan dalam pengembangan instrumen kebijakan dalam penerapan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan di bawah umur di Kabupaten Sampang .....	137
V1.2. Bagaimana Instrumen Kebijakan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Sampang digunakan .....	140
V1.3. Instrumen Kebijakan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Sampang.....	141
V1.4. Interpretasi Hasil Penelitian terkait Penelitian Terdahulu .....	142
<b>BAB VII PENUTUP</b>	
V11.1. Kesimpulan.....	145
V11.2. Rekomendasi .....	147
V11.3. Implikasi Akademis dan Praktis.....	147

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**